

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai sistem akuntansi piutang pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi piutang yang diterapkan telah berjalan secara terstruktur dan terintegrasi dengan baik melalui penggunaan sistem informasi digital seperti SAP IS-U dan AP2T. Kedua sistem ini memungkinkan proses pencatatan piutang dilakukan secara otomatis mulai dari tahap pembacaan meter hingga pelaporan keuangan, sehingga mendukung efektivitas manajemen dalam pemantauan piutang dan pengambilan keputusan.

Jenis-jenis piutang yang tercatat dalam perusahaan sangat beragam, antara lain piutang pelanggan reguler, piutang non-taglis, piutang tagihan susulan, piutang biaya keterlambatan, piutang pajak penerangan jalan umum (PPJU), piutang PPN, piutang bea materai, dan piutang layanan informasi. Keberagaman ini menuntut sistem akuntansi yang mampu mencatat, mengelola, serta melaporkan piutang secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pencatatan piutang dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam PSAK, terutama PSAK 23 dan PSAK

71, serta mengacu pada Pedoman Akuntansi PLN. Selain itu, PLN juga membentuk cadangan kerugian piutang sebagai langkah preventif untuk menghadapi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat, seperti keterlambatan pembayaran oleh pelanggan, data pelanggan yang tidak akurat, keberadaan sambungan ilegal, dan keterbatasan personel di lapangan yang menyebabkan penanganan piutang tidak dapat dilakukan secara optimal. Di samping itu, prosedur penghapusan piutang yang terlalu panjang dan birokratis turut menjadi tantangan dalam penyajian laporan keuangan yang lebih realistis. Kendala-kendala tersebut dapat berdampak pada tingginya saldo piutang dan berkurangnya efisiensi dalam proses penagihan.

Namun demikian, PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat telah memiliki prosedur penghapusan piutang yang cukup sistematis dan terukur, mulai dari identifikasi, penyusunan berita acara, verifikasi internal, hingga pengajuan persetujuan ke tingkat yang lebih tinggi bila diperlukan. Piutang yang telah dihapuskan pun tetap dapat dipulihkan apabila pelanggan kembali teridentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi piutang yang diterapkan tidak hanya mendukung kelancaran administrasi dan pelaporan keuangan, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan, sistem akuntansi piutang di PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat telah berperan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan keuangan perusahaan. Walaupun masih terdapat sejumlah tantangan, sistem yang telah diterapkan sudah cukup memadai dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengelolaan piutang yang kompleks dan dinamis di lingkungan kerja PLN.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat dalam upaya penyempurnaan sistem akuntansi piutang. Pertama, perusahaan perlu melakukan pembaruan dan validasi data pelanggan secara berkala guna menghindari kesalahan pencatatan dan memperlancar proses penagihan. Ketepatan data sangat krusial untuk memastikan bahwa tagihan tersampaikan kepada pihak yang tepat dan menghindari terjadinya piutang macet akibat pelanggan yang sudah tidak aktif atau tidak diketahui keberadaannya.

Kedua, perusahaan disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada bagian verifikasi dan penagihan piutang. Pelatihan rutin mengenai penggunaan sistem SAP IS-U dan AP2T serta pemahaman tentang standar akuntansi yang berlaku perlu ditingkatkan agar staf di lapangan mampu menjalankan tugas dengan lebih efisien dan akurat.

Penambahan jumlah personel di bagian penagihan juga dapat membantu mempercepat proses penanganan piutang bermasalah dan meningkatkan rasio piutang tertagih.

Ketiga, pengembangan fitur pengingat otomatis atau sistem notifikasi kepada pelanggan dapat menjadi solusi untuk mengurangi keterlambatan pembayaran. Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi PLN Mobile atau media komunikasi lainnya diharapkan mampu mendorong kesadaran pelanggan untuk membayar tagihan tepat waktu. Selain itu, perusahaan juga dapat memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan atau pihak ketiga dalam rangka optimalisasi penagihan piutang yang sudah memasuki kategori diragukan atau macet.

Selanjutnya, prosedur penghapusan piutang yang saat ini dinilai cukup panjang dan birokratis sebaiknya ditinjau kembali agar lebih efisien, tanpa mengurangi aspek kehati-hatian dan akuntabilitas. Hal ini penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi riil dan tidak terbebani oleh piutang yang sudah tidak dapat ditagih. Penguatan koordinasi antara unit pelaksana dan kantor pusat dalam proses penghapusan juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi keterlambatan administratif.

Akhirnya, penulis menyarankan agar PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem akuntansi piutang secara menyeluruh, baik dari sisi teknologi, kebijakan internal, maupun pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Langkah ini penting untuk

menjaga kredibilitas perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan keberlanjutan keuangan yang sehat dalam jangka panjang.

